

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT
(BLSM) DI KECAMATAN LIMA KAUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH
DHANTYA SRI DEWI
NIM 16094/2010**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Nama : Dhantya Sri Dewi

TM/NIM : 2010/16094

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Juni 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
NIP: 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



DR. Dasril, M.Ag
NIP.19580422 198703 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

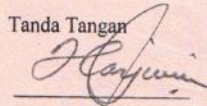
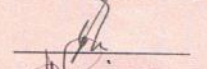
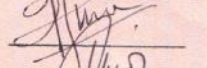
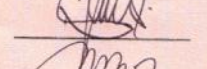
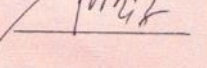
Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**

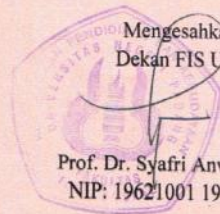
Nama : Dhantya Sri Dewi
TM/NIM : 2010/16094
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 12 Juni 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Sekretaris	: DR. Dasril, M.Ag	
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP: 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

**DHANTYA SRI DEWI : 16094/2010. EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG
SEMENTARA MASYARAKAT DI
KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN
TANAH DATAR**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terlihat efektif dan efisiennya penyelenggaraan program BLSM yang ada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar. Penelitian ini bertujuan 1) Mengidentifikasi proses pendataan dan penyaluran dana BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan dari kebijakan BLSM tersebut. 2) Menganalisis pelaksanaan BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. 3) menganalisis dampak Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terhadap masyarakat penerima BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pendataan masyarakat penerima manfaat data yang datang dari pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh TNP2K berbeda dengan data yang ada di Nagari. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara petugas pendataan dengan pihak yang ada di nagari, terlebih Wali Jorong yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dimana data yang masyarakat miskin berdasarkan TNP2K ada delapan ratus tiga belas Kepala Keluarga, sedangkan data yang ada di setiap Nagari di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar berjumlah seribu dua ratus lima puluh KK masyarakat miskin. Dilihat dari mekanisme penyaluran dana BLSM melalui PT.POS Indonesia yang di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kecamatan Lima Kaum Berjalan dengan tertib dan aman. Kantor POS sebagai pendistribusian KPS yang di dalamnya tergabung BLSM sudah melayani masyarakat dengan baik. Dimana sasaran utamanya adalah masyarakat ekonomi lemah (masyarakat miskin). Kebijakan ini berjalan selama empat bulan dengan dua tahap. Namun setelah peneliti mengangkat kasus ini mendapat banyak kritikan dan protes dari dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak terdata. Dampak BLSM yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, kurang berarti. Hal ini di sebabkan durasi yang singkat dan dana per KK sedikit untuk belanja minimum keluarga saja tidak terpenuhi, sedangkan anggaran BLSM untuk Kecamatan Lima Kaum saja lebih dari empat ratus juta rupiah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatu

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”**. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP.

3. Ketua jurusan Ilmu Sosial Politik Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Bapak Drs.Syamsir,M.Si,Ph.D yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
4. Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si.selaku pembimbing I dan Dr.Dasril,M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D, Bapak Drs. Syamsir, M.Si,Ph.D dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
7. Teristimewa untuk Orang Tuaku, Kakak- kakak ku tersayang serta keluarga yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan do'a, semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 terima kasih atas segala kebaikannya.
9. Seluruh sahabat, Orang yang tersayang dan teman teman-temanku yang telah membangkitkan semangat studiku, serta telah memberi masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studiku selama ini.
10. Jajaran SKPD Kabupaten Tanah Datar, dan seluruh Staf Kenagarian yang ada di Lingkungan kerja Kecamatan Lima Kaum yang telah banyak

membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal allamin.

Padang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Mamfaat penelitan	9
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Konsep Evaluasi Kebijakan	14
B. Kerangka Konseptual	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
2. Landasan Hukum BLSM.....	38
B. Temuan Khusus	
1. Proses Pendataan dan Penyaluran BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar	39
2. Pelaksanaan Kebijakan BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.....	49
3. Dampak BLSM Terhadap Masyarakat Penerima BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar...55	
C. Analisis dan Pembahasan	
1. Proses Pendataan dan Penyaluran BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar	67
2. Pelaksanaan Kebijakan BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.....	68

3. Dampak BLSM Terhadap Masyarakat Penerima BLSM
di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar....71

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Alur Pengolahan Data BLSM.....	45
Gambar 4.2 Cara Menggunakan KPS untuk Program BLSM	47
Gambar 4.3 Cara Pengambilan Bantuan di kantor Pos.....	47
Gambar 4.4 Keadaan Rumah Pak Ogah.....	61
Gambar 4.5 Keadaan Rumah Ibu Saraswati.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Nagari dan Jorong di Kecamatan Lima Kaum.....	36
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Lima kaum.....	37
Tabel 4.3 Anggaran kebijakan BLSM untuk Wilayah Indonesia.....	52
Tabel 4.4 Anggaran kebijakan BLSM untuk Kecamatan Lima Kaum.....	53
Tabel 4.5 Jumlah Dana dan Penerima BLSM tiap Nagari di Kecamatan Lima Kaum	53
Tabel 4.5 Jumlah Masyarakat Miskin di Kecamatan Lima Kaum.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan BBM merupakan kebijakan yang telah direncanakan sejak tahun 2012. Namun pada bulan April 2012 saat kebijakan ini akan diimplementasikan, semua kalangan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memprotes kebijakan tersebut, akhirnya pemerintah menunda kenaikan harga minyak. Dalam teori Kebijakan publik disebutkan adanya hubungan peran serta horizontal antara pemerintah dengan masyarakat.

“peran serta horizontal terjadi dalam hubungan yang bersifat demokratis antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat berpartisipasi dalam politik dengan tujuan untuk ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran serta ini dapat berbentuk positif, seperti pemilihan umum, dukungan, dan bela negara. Dapat juga berbentuk negatif, seperti demonstrasi, kritik, dan tuntutan...” (Said Zainal Abidin, 2012:9)

Jadi dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ada kepedulian dan tanggung jawab masyarakat di dalamnya. Peran serta masyarakat dapat terwujud jika masyarakat menyadari bahwa kebijakan pemerintah mempunyai dampak terhadap kehidupannya, dan keikutsertaan nya dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Begitu juga halnya dengan kebijakan pemerintah dalam menunda kebijakan menaikkan harga minyak, dengan alternatif lain, keluar sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bahwa yang memiliki kendaraan mewah dan kendaraan milik negara harus menggunakan bahan bakar yang tidak bersubsidi,

seperti pertama, namun tidak semua subjek yang ada dalam peraturan tersebut mengindahkannya.

Setelah setahun kebijakan kenaikan harga minyak di tunda dengan memperhatikan berjalan atau tidaknya alternatif yang diberikan oleh pemerintah, akhirnya pada bulan Juni tahun 2013 pemerintah mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak dan tidak bersubsidi lagi. Walaupun banyak masyarakat yang melakukan kritik dan demonstrasi, namun tidak menghambat kebijakan ini berjalan. Pemerintah pun telah menyediakan program sebagai pengalihan subsidi BBM ini berupa bantuan kepada masyarakat yang terbilang berada di kalangan ekonomi menengah kebawah.

Pengalihan subsidi BBM ini berbentuk program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Di bidang ekonomi dinamakan dengan Bantuan Langsung Sementara masyarakat (BLSM), sedangkan di bidang Pendidikan dinamakan dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Walaupun bantuan tersebut hanya sementara setidaknya sudah bisa mengurangi beban masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah.

“ upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantages people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choices and life*); kesempatan (*chances*); definisi kebutuhan (*need definition*); gagasan (*ideas*); institusi (*institution*); sumber-sumber daya (*resources*); aktivitas ekonomi (*economy activity*) dan reproduksi (*reproduction*) dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*); aksi politik dan sosial (*social and political actioan*); serta pendidikan (*education*).” (Ife, dalam Isbandi Rukmianto Adi, 2012:207)

Menurut Bapak Amrizal, dalam pengimplementasian program BLSM dan BSM tersebut walaupun baru tahap awal pada bulan Juli tahun 2013 bahwa penyaluran dana tersebut dirasa kurang tepat sasaran oleh masyarakat. Maksudnya disini bahwa yang menerima dana pengalihan subsidi atau BLSM tersebut kebanyakan dari masyarakat mampu. Banyak dari masyarakat miskin tidak terdata dalam pendataan program ini. Kedengarannya memang sangat ideal, akan tetapi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM tersebut dinilai sebagian pihak sebagai kebijakan yang sensitif dan rentan menimbulkan konflik sosial jika penyalurannya kurang tepat (Wawancara, 10 Januari 2014).

Kebijakan pemerintah dengan menggulirkan BLSM ini bertujuan memberikan fondasi atau dasar bagi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak dari kenaikan BBM. Pada kenaikan BBM tahun 2013 ini, setiap warga yang dianggap miskin mendapatkan Rp. 150.000 setiap bulan selama 4 bulan, diharapkan sedikit mengangkat daya beli yang sudah tentu akan sangat merosot sebagai akibat kenaikan harga-harga bahan pokok sebagai efek domino dari kebijakan kenaikan BBM. Namun dalam prosesnya banyak sekali kendala yang menjadi biang keladi timbulnya konflik dimasyarakat.

Bapak Amrizal juga mengatakan banyak pihak yang menilai BLSM ini kurang efektif, melainkan hanya mendidik masyarakat untuk

hidup konsumtif. Perlu pengawasan yang ketat dalam proses penyaluran sekaligus memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat bahwa uang BLSM ini diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif atau setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari sampai masyarakat terbisaa dengan dampak dari kenaikan harga BBM tersebut (wawancara, 10 Januari 2014)

Selain persoalan di atas, persoalan lain yang dirasakan oleh pihak kengarian seperti yang diungkapkan oleh Kaur Kesra Nagari Limo Kaum masalah dalam pendataan BLSM, dimana kurangnya koordinasi antara pihak pendata yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan pihak Wali Nagari. Karena data masyarakat miskin yang dipakai oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan masih menggunakan data yang lama, sehingga masih ada masyarakat yang tergolong miskin dalam data kewal nagarian yang tidak terdata oleh TNP2K. (Wawancara, tanggal 7 Januari 2014).

Menurut Sekretaris Nagari Limo Kaum Bapak Gusrial, dalam pendataan BLSM, ada indikator yang dilihat untuk mengkategorikan masyarakat miskin, diantaranya adalah tempat tinggal, penghasilan, agama serta pendidikan. Biasanya indikator yang paling dominan dalam mengkategorikan miskin dilihat dari penghasilan keluarga, namun dalam pendataan program BLSM ini dilihat adalah tempat tinggal. Kebanyakan yang menerima BLSM ini, banyak menghuni tempat tinggal dari semi

permanen, langsung dikategorikan miskin, tanpa melihat lebih dalam lagi mengenai keluarga tersebut.(Wawancara, 7 Januari 2014)

Sebaiknya tempat tinggal tidak dijadikan indikator yang dominan dalam pendataan untuk mengkategorikan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan walaupun terkadang tempat tinggalnya tidak permanen namun penghasilan dari keluarga tersebut lebih dari cukup, begitu juga sebaliknya terkadang suatu keluarga memiliki tempat tinggal yang layak, karena goncangan ekonomi penghasilan keluarganya tidak mencukupi berdasarkan wawancara dengan Ibu Reni Novita selaku masyarakat di nagari Limo Kaum, bahwa beliau tidak terdata dalam kategori masyarakat miskin karena tempat tinggalnya layak, namun setelah diketahui bahwa beliau seorang janda dengan empat orang anak. Beliau merasa jika tempat tinggal dijadikan faktor dominan dirasa tidak adil dengan kondisi beliau. (Wawancara, 8 Januari 2014)

Karena persoalan di atas dan program ini sudah berakhir pada bulan September 2013, maka dilakukan penelitian ini pada tahapan evaluasi kebijakan BLSM tersebut.

Menurut Said Zainal Abidin (2012:165) menyatakan evaluasi mencakup tiga pengertian yaitu: (1) Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*). (2) evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring. (3) evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (*ex-post evaluation*).

Dari beberapa jenis bentuk evaluasi program yang dikemukakan oleh ahli di atas, maka penulis akan mengambil tahapan evaluasi akhir setelah dilakukannya kebijakan BLSM tersebut. Karena penulis melihat bahwa kurangnya efisiensi, keuntungan, efektif, keadilan, dan manfaat tambahan yang diperoleh dari Implementasi program ini.

“....melihat evaluasi dalam hubungan dengan perubahan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai dampak dari suatu kebijakan. Dampak dari kebijakan itu tidak selalu sama seperti yang di rencanakan semula.” (Hogwood, dalam Said Zainal Abidin, 2012:168)

Dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat seperti BLSM diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, namun setiap tujuan akhir yang diinginkan tidak selalu sama dengan hasil akhir kebijakan.

Pada observasi awal tanggal 10 Januari di Kecamatan Lima Kaum terdapat 830 KK yang di kategorikan miskin. Namun tidak semua kebijakan berjalan dengan semestinya, salah satunya kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang ada di Kecamatan Lima Kaum, bahwa kenyataannya setelah tiga bulan berturut-turut pembagian program BLSM ini dan berakhir pada bulan September kemarin, kurang efektif dan kurang efisien pelaksanaannya.

Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Evaluasi Pelaksanaan Program BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupten Tanah Datar”***.

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program BLSM tersebut, yaitu:

1. Belum terlihat efektif dan efisien penyelenggaraan program BLSM.
2. Kurangnya rasa keadilan dalam pendataan masyarakat dalam penyaluran BLSM.
3. Indikator yang dominan dipakai oleh TNP2K Berbeda dengan indikator dominan yang ada di nagari.
4. Kurangnya koordinasi antar organisasi (antar pihak walinagari dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dalam penyaluran BLSM.

b. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori dan tempat, dan supaya penelitian lebih terfokus maka penelitian ini penulis batasi pada *“Evaluasi Pelaksanaan Program BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”*.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah proses pendataan dan penyaluran dana BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan dari kebijakan BLSM tersebut?

2. Apakah pelaksanaan BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan dari kebijakan tersebut?
3. Bagaimanakah dampak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terhadap masyarakat yang menerima BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?

C. Fokus Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian mengenai *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kecamatan Lima Kaum*, maka penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Dilihat dari efektivitas kebijakan
2. Dilihat dari efisiensi kebijakan
3. Dilihat dari kecukupan bantuan yang diberikan
4. Dilihat dari distribusi bantuan tersebut
5. Dilihat dari responsivitas masyarakat terhadap kebijakan
6. Dilihat dari ketepatan atau kegunaan dari hasil kebijakan

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi proses pendataan dan penyaluran dana BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan dari kebijakan BLSM tersebut.
2. Menganalisis pelaksanaan BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

3. Menganalisis dampak Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terhadap masyarakat penerima BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya di bidang analisis dan evaluasi kebijakan publik.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Khususnya pemerintah Kecamatan Lima Kaum yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan BLSM di Kecamatan Lima Kaum.
 - 2) Peneliti lebih lanjut, sebagai bahan informasi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.